



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 135/DJU/OT.01.3/1/2023 Jakarta, 20 Januari 2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Penilaian Mandiri  
Pembangunan Zona Integritas

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri

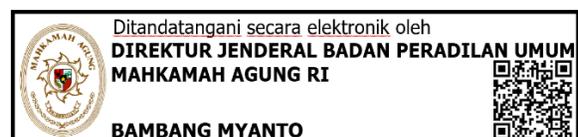
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas pada pengadilan di lingkungan peradilan umum tahun 2023 yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan Pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas bagi Pengadilan Tinggi secara daring melalui *zoom meeting* sekaligus evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan (jadwal dan link akan diinfokan kemudian)
2. Memastikan syarat pengusulan WBK/WBBM terpenuhi seluruhnya yaitu:
  - a. Presentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK 100%;
  - b. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN 100%;
  - c. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SIHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN 100%;
  - d. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM minimal 1 (satu) tahun;
  - e. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B" untuk satker yang diusulkan WBK dan predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB" untuk satker yang diusulkan WBBM;
  - f. Pada penilaian terakhir telah memperoleh predikat "A" dalam penilaian evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan/akreditasi penjaminan mutu;
  - g. Satker yang akan diusulkan pada tahap penilaian pendahuluan tidak memiliki catatan hukuman disiplin berat pada Badan Pengawasan (pernyataan tertulis Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri).

3. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI sesuai dengan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pengisian LKE dapat dilakukan mulai tanggal **6 s.d 20 Februari 2023** melalui <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>
4. Seluruh Pengadilan Tinggi, agar melakukan verifikasi penilaian Zona Integritas pengadilan-pengadilan negeri di wilayah hukumnya, dan selanjutnya mengusulkan nilai ZI yang terbaik/tertinggi setelah diverifikasi Pengadilan Tinggi (masing-masing 1 (satu) Pengadilan Negeri untuk setiap kelas pengadilan) dengan mengisi form usulan pada tautan berikut ini <https://s.id/usulan-zi>  
Khusus untuk Pengadilan Tinggi Jakarta agar melakukan verifikasi dan mengusulkan 3 (tiga) Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan nilai ZI tertinggi.
5. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melakukan *desk evaluation* untuk LKE Pengadilan Tinggi dan memverifikasi penilaian Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri paling lambat tanggal **28 Februari 2023**.
6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum akan melaksanakan kegiatan nomor 5 bersamaan dengan evaluasi kinerja dan penjaminan mutu layanan pengadilan dengan ketentuan bahwa mulai tahun 2023 penjaminan mutu untuk Pengadilan Negeri Kelas IA bukan merupakan ibukota provinsi akan dilaksanakan oleh PT yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



## JADWAL PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN																
		JANUARI		FEBRUARI				MARET				APRIL					
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Pendampingan penilaian pembangunan Zona Integritas secara daring oleh Badan Pengawasan MA RI kepada Seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri		25-Jan														
2	Pengisian LKE ZI mulai tanggal 6 s.d 20 Februari 2023 melalui <a href="https://pmpzi.mahkamahagung.go.id">https://pmpzi.mahkamahagung.go.id</a>																
3	Verifikasi penilaian LKE pembangunan ZI Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi paling lambat tanggal 28 Februari 2023						s/d 28 Feb										
4	Pengadilan Tinggi mengirimkan usulan PN penerima WBK/WBBM beserta nilai akhir LKE ZI paling lambat tanggal 1 Maret 2023 melalui tautan <a href="https://s.id/usulan-zi">https://s.id/usulan-zi</a>																
5	Ditjen Badilum melakukan <i>desk evaluation</i> terhadap Pengadilan Tinggi dan PN yang diusulkan PT																


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 MAHKAMAH AGUNG RI**  
  
**BAMBANG MYANTO**